



► PENATAAN KOTA

DPRD Minta Pemkot Utamakan Kesejahteraan

UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta kepada Pemkot untuk menyetop penggunaan dana kesetrawaan (danais) lagi penataan perkotaan dan pengerjaan proyek fisik. Program itu disebut tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan warga maupun pengentasan persoalan sosial terutama kemiskinan.

"Matanya anggaran fisik dari danais untuk beutifikasi perkotaan atau cagar budaya dengan menggunakan danais itu ya dikurangi dan dialihkan untuk program penanganan kemiskinan dan program kesejahteraan sosial lainnya," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan, Senin (30/1).

Krisnadi menyebut, keterbatasan anggaran memang menjadi salah satu kendala dalam program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Jogja. Hanya saja, Pemkot bisa mengambil jalan tengah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengintervensi kebijakan penanganan di sektor itu. Misalnya saja dengan mengalokasikan beberapa persen danais untuk mendukung program kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada 2022, kata dia, alokasi danais untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp30 miliar-Rp40 miliar. Anggaran itu menurutnya terlalu berlebihan lantaran tidak memberikan efek domino yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jogja secara langsung. Sementara pada tahun yang sama, dalam rapat bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda), anggaran penanganan kemiskinan disebut mencapai nominal Rp80 miliar.

"Itu sempat saya tanya, dari Rp80 miliar itu yang diterima tunai masyarakat berapa. Ya hanya Rp3 juta per orang dalam bentuk santunan kematian [sankem] dan syaratnya harus meninggal dulu," kata politikus Gerindra itu.

Padahal, kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah, pendidikan, kesehatan dan transportasi umum atau publik mendesak untuk diselenggarakan di Kota Jogja.

Sekretaris Daerah Kota Jogja, Aman Yuriadijaya mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya angka kemiskinan di Kota Jogja malah menurun dari yang sebelumnya di angka 7,6% menjadi 6,2%. Hal ini diklaimnya menunjukkan hasil intervensi yang dilaksanakan Pemkot Jogja mulai membuahkan hasil.

Pada 2023 di Kota Jogja terdapat 17.451 kepala keluarga (KK) yang masuk Kelurga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Mereka terdiri dari kategori fakir miskin, rentan miskin, dan keluarga miskin. Dari jumlah tersebut jika dirinci lebih lanjut ada sebanyak 14.986 KK merupakan warga kategori rentan miskin dan 2.465 KK lagi masuk ke Dalam kategori keluarga miskin. (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005